

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia secara resmi melaksanakan sistem desentralisasi fiskal sejak 1 Januari 2001. Pelaksanaan desentralisasi fiskal selaras dengan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, adanya Undang-Undang tersebut menjadi pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018:11) menyatakan adanya otonomi daerah memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Sehingga pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Maka dari itu, adanya otonomi daerah dapat menciptakan kemandirian di daerah dan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemerintahannya dan keuangannya. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dapat meningkatkan kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan melaksanakan fungsi alokatif dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah akan menjadi potensi dan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan kemampuan dan mengembangkan kemampuan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

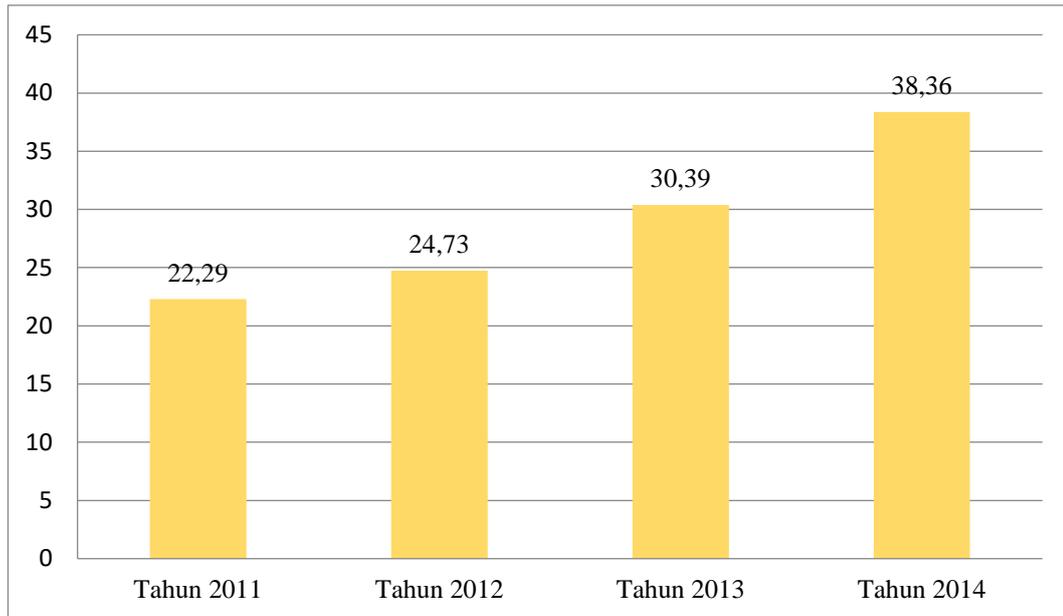
Setiap pemerintah daerah yang melaksanakan desentralisasi fiskal memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban tersebut dapat terpenuhi dengan pengelolaan potensi sumber daya keuangan optimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Keberhasilan pengelolaan potensi daerah tersebut dapat diukur dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan dan berdasarkan kemandirian keuangan daerah.

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah menjadi ciri suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan baik. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kemandirian Keuangan Daerah adalah pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

Pemerintah daerah yang mampu mengelola daerahnya dengan baik, maka diharapkan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut akan tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa daerah tersebut telah mampu dan mandiri membiayai kebutuhan daerahnya dan meminimalkan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat termasuk kedalam daerah otonom yang memiliki kewenangan menjalankan otonomi daerahnya dan memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengelola dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahannya. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki potensi sumber daya manusia yang unggul dan sumber daya alam yang melimpah yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang baik dan tingkat kemandirian keuangan daerah yang stabil.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah 2021

Gambar 1. 1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010-2014

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011-2014. Setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai dengan 2014 tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan. Tahun 2011 tingkat kemandirian keuangan daerah mencapai angka 22,29% dan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 2,44% menjadi 24,73%, untuk tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 5,66% menjadi 30,39% dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 7,97% menjadi 38,36%. Namun, meskipun setiap tahunnya mengalami kenaikan untuk kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, nilai tersebut masih masuk dalam kategori rendah dan dalam pola hubungan pemerintah konsultatif. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih rendah dan masih membutuhkan Pemerintah Pusat.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan pinjaman. Untuk mencapai Tingkat Kemandirian Daerah yang baik, maka Pemerintah Daerah harus mampu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah Pusat dapat menurun. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang diikuti dengan menurunnya penerimaan bantuan dari Pemerintah Pusat akan mencerminkan Kemandirian Keuangan Daerah suatu daerah dalam kondisi baik.

Kemandirian keuangan daerah erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan melalui potensi dan kekayaan daerahnya itu sendiri. Hal tersebut menandakan kemandirian keuangan daerah tidak terlepas dari adanya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki empat komponen indikator yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari keempat komponen tersebut pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga peluang pajak daerah dan retribusi daerah masih terbuka lebar untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah serta pembangunan nasional.

Setiap kontribusi dari masing-masing indikator Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Kontribusi Masing-Masing Indikator Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2014

Tahun	Jenis Penerimaan			
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD yang sah
2011	Rp 3.291.675.835.041	Rp 794.118.486.748	Rp 203.482.965.766	Rp 1.597.853.656.014
2012	Rp 4.715.328.850.913	Rp 856.900.422.004	Rp 218.048.132.695	Rp 2.147.522.273.403
2013	Rp 6.339.729.834.099	Rp 1.069.741.322.507	Rp 262.869.449.996	Rp 2.528.971.386.258
2014	Rp 7.790.145.005.884	Rp 1.270.529.081.743	Rp 296.194.261.472	Rp 4.721.872.757.890

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah 2021

Berdasarkan data pada tabel 1.1 nilai pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kontribusi tertinggi terhadap pendapatan asli daerah. Potensi pajak dan retribusi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat masih terbuka lebar terlihat dari penerimaan pajak dan retribusi selama lima tahun yaitu tahun 2011-2014 selalu mengalami peningkatan.

Menurut Lia dan Dematria (2020), Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor yang sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan daerah serta penetapan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran dari pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai sumber penghasilan bagi daerah, sehingga setiap potensi yang dapat menghasilkan bagi daerah harus dapat di gali semaksimal mungkin dan di kelola dengan sebaik-baiknya. Tentunya tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, menuntut setiap golongan masyarakat untuk kritis dan mengetahui segala hal informasi yang disampaikan pemerintah. Salah satunya fenomena terkait dengan Pasal 114 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP No. 10 Tahun 2021).

Fenomena tersebut didukung berdasarkan siaran pers yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dalam *website* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, membahas mengenai Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Pelayanan Daerah. Dalam siaran pers tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 dibuat dengan tujuan untuk memperkuat pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional dan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Latar belakang terbitnya aturan ini untuk penyempurnaan kebijakan pajak dan retribusi. Diharapkan pelaksanaan kebijakan ini dapat meningkatkan investasi, penciptaan kerja, percepatan proyek nasional hingga penataan administrasi perpajakan dan retribusi.

Dengan demikian, adanya perbaikan kebijakan tersebut dapat memaksimalkan peluang pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Selain adanya kebijakan untuk penyempurnaan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat fenomena elektronifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kegiatan elektronifikasi

yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Dilansir pada laman DDTCNews, menyatakan Bank Indonesia mencatat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) mengalami kenaikan cukup signifikan pada Maret 2021, terutama pada transaksi pendapatan daerah dan pemanfaatan kanal digital seperti QRIS. Transaksi penyetoran pajak daerah sudah mencapai 81,6% dan retribusi daerah mencapai 65,8%. Penyetoran pajak daerah yang tercatat paling banyak dilakukan secara nontunai antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB), PBB-P2, pajak hotel, dan pajak reklame. QRIS tercatat banyak digunakan masyarakat untuk membayar retribusi pasar, PKB, e-Samsat, KIR, dan pembayaran di daerah wisata.

Dengan demikian, adanya perbaikan kebijakan dan elektronifikasi yang dilakukan untuk penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah menandakan pemerintah sangat memaksimalkan peluang pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap kemandirian keuangan daerah, adapun penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

1. Nggilu, Fadly, dkk (2016) “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap

Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,000 dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 76% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 34% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

2. Novalistia, Rizka Lutfita (2016) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Pendapatan Asli Lainnya dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Otonomi Daerah, dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Otonomi Daerah.
3. Febriyanti, Feni dan Muhammad Faris (2019) “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi sebesar 77,3% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 22,7% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

4. Sutrisno, Mulkan Teguh Dan Arif Santoso (2021) “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur.
5. Balqis, dkk (2018) “Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013 – 2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama hipotesis menggunakan uji signifikansi parameter simultan yang membuktikan bahwa terdapat hubungan positif dan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil atas kemandirian keuangan daerah yang dibuktikan dengan $\text{sig} = 0,000 < 0,05$. Hipotesis kedua menggunakan uji signifikansi parameter individu yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan pajak daerah atas kemandirian keuangan daerah yang dibuktikan dengan nilai $\text{sig} = 0,000 < 0,05$. NS hipotesis ketiga menggunakan uji signifikansi parameter individu yang membuktikan bahwa ada pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dibuktikan dengan $\text{sig} = 0,224 > 0,05$. Hipotesis keempat menggunakan parameter individu uji signifikansi membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif dan

signifikan terhadap pendapatan sharing tentang kemandirian keuangan daerah yang dibuktikan dengan nilai $\text{sig} = 0,001 < 0,05$.

6. Novitasari, Maya dan Lita Novitasari (2019) “Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara silmutan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
7. Erawati, Nyoman Trisna dan Leny Suzan (2015) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Survei Pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009-2013)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil uji parsial keempat komponen pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara umum, tidak berpengaruhnya ketiga komponen pendapatan asli daerah dikarenakan pertumbuhan komponen pendapatan asli daerah tersebut berfluktuatif sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung cukup stabil.

8. Tolosang, Krest D (2018) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama- sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.
9. Wahyuningsih, Panca (2015) “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah (Survei Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Periode 2011-2015)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis menunjukkan bahwa secara parsial pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Bersamaan dengan itu, pajak daerah, retribusi daerah, dan umum alokasi dana berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
10. Andriani, R. Neneng Rina dan Nisa Noor Wahid (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015)”. Hasil ini penelitian menunjukkan bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Dana Perimbangan

berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

11. Putri, Meilda Ellysa dan Sri Rahayu (2015) “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3% dan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
12. Mariyanto, Joko (2015) “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen yang dominan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga penerimaan pajak daerah harus terus ditingkatkan dengan cara optimalisasi pemungutan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah merupakan komponen yang penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
13. Nugraha, I Putu Bagus Indra Mulia dan A.A.N.B Dwirandra (2016) “Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU Dan DBH Pada Belanja Modal”. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada belanja modal sedangkan DBH tidak berpengaruh pada belanja modal. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah pada belanja modal, namun tidak mampu memoderasi pengaruh DAU dan DBH pada belanja modal.

14. Sanga, Konstatinus Pati, dkk (2018) “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai 0,103 dan untuk variabel Retribusi Daerah juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai 0,410. Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan 0,045. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi sebesar 87% terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya sebesar 12,7% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.
15. Mea, Frangky Martinus, dkk (2017) “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50 persen dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 persen atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Hal ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk masih kurang yang tergambar dari

tingkat pendapatan per kapita yang masih kurang dan tingkat kemandirian daerah masih rendah. Analisis tren pajak daerah untuk tahun 2016-2020 mengalami peningkatan namun masih berada dibawah 5 (lima) miliar rupiah setiap tahunnya sehingga masih perlu ditingkatkan.

16. Puspitasari, Arum dan Naila Rizki Salisa (2017) “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Karesidenan Pati Tahun 2010-2016)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. (2) Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
17. Nasution, Anggi Pratama, dkk (2018) “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, dan efisiensi belanja daerah, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah kemerdekaan. Secara parsial variabel pendapatan daerah, transfer pemerintah pusat berpengaruh signifikan tentang kemandirian keuangan daerah. Namun, efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
18. S, M. Zahari M (2016) “Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak dan retribusi daerah masih rendah dan perlu ditingkatkan. Selama periode 2010-2015, kontribusi pajak daerah pendapatan

asli daerah terhadap PAD rata-rata 23,1% satu tahun, dan kontribusi pendapatan asli daerah penerimaan retribusi rata-rata 16,01% satu tahun. Secara keseluruhan, pajak lokal dan lokal retribusi berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Sarolangun.

19. Kristina, Siti Raun, dkk (2021) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah, sementara untuk variabel Dana Perimbangan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. dan secara bersamaan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
20. Putra, Rico dan Surya Hidayat (2016) “Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tingkat Kemandirian keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah masih rendah; 2) Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rasio-rasio kemandirian keuangan daerah (derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio kemandirian dan efektivitas PAD) dengan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. 2 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Nggilu, Fadly, dkk 2016 Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah • Metode Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun dan Tempat Penelitian 	Secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,000 dan untuk variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 76% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 34% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16, No. 04, 2016, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado
2	Novalistia, Rizka Lutfita 2016 Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah • Dana bagi hasil pajak • Tahun Penelitian dan Tempat Penelitian 	Pajak Daerah, Pendapatan Asli Lainnya dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap Otonomi Daerah, dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Otonomi Daerah.	<i>Journal Of Accounting</i> , vol 2, No. 2, 2016, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pandanaran Semarang,

	Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Jawa Tengah				ISSN 2502-7697
3	Febriyanti, Feni dan Muhammad Faris 2019 Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah • Teknik Analisis Data 	• Tahun dan Tempat Penelitian	Hasil penelitian secara simultan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi sebesar 77,3% terhadap variabel Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 22,7% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, Vol. V, No. 2, 2019, Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Lamongan, ISSN 2597-9116
4	Sutrisno, Mulkan Teguh Dan Arif Santoso 2021 Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Teknik Analisis Data 	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur	Majalah Inspiratif, Vol. 7, No. 13, 2021, Akademi Akuntansi Effendi Harahap, Magister Akuntansi UNDIP

5	<p>Balqis, dkk 2018</p> <p>Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013 – 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Pajak Daerah • Dana Bagi Hasil • Tempat dan Waktu Penelitian 	<p>Pertama hipotesis menggunakan uji signifikansi parameter simultan yang membuktikan bahwa terdapat hubungan positif dan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil atas kemandirian keuangan daerah yang dibuktikan dengan $\text{sig} = 0,000 < 0,05$. Hipotesis kedua menggunakan uji signifikansi parameter individu yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan pajak daerah atas kemandirian keuangan daerah yang dibuktikan dengan nilai $\text{sig} = 0,000 < 0,05$. NS hipotesis ketiga menggunakan uji signifikansi parameter individu yang membuktikan bahwa ada pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dibuktikan dengan $\text{sig} = 0,224 > 0,05$. Hipotesis keempat menggunakan parameter individu uji signifikansi membuktikan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan sharing tentang kemandirian keuangan daerah yang dibuktikan dengan nilai $\text{sig} = 0,001 < 0,05$.</p>	<p>Permana, Vol. IX, No. 2, 2018, Program Studi Akuntansi, Program Studi Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti</p>
6	<p>Novitasari, Maya dan Lita Novitasari 2019</p> <p>Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja Modal • Dana Bagi Hasil • Pertumbuhan Ekonomi 	<p>Hasil penelitian menunjukkan pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan DBH dan pertumbuhan</p>	<p>Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 2, 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas</p>

	Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Tempat dan Waktu Penelitian 	ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara silmutan pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	PGRI Madiun
7	Erawati, Nyoman Trisna dan Leny Suzan 2015 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Survei Pada Dpkad Kota Bandung Periode 2009-2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah 	Hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil uji parsial keempat komponen pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara umum, tidak berpengaruhnya ketiga komponen pendapatan asli daerah dikarenakan pertumbuhan komponen pendapatan asli daerah tersebut berfluktuatif sedangkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Bandung cukup stabil.	<i>e-Proceeding of Management</i> , Vol. 2, No. 3, 2015, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, ISSN 2355-9357
8	Tolosang, Krest D 2018 Pengaruh Pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi • Pendapatan Asli Daerah 	pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 18, No.

	Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon			daerah. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah Kota Tomohon.	03, 2018, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi
9	Wahyuningsih, Panca 2015 Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah (Survei Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Periode 2011-2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • DAU 	Analisis menunjukkan bahwa secara parsial pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Bersamaan dengan itu, pajak daerah, retribusi daerah, dan umum alokasi dana berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis), Vol. 01, No. 01, 2015, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara, ISSN 2502-3497
10	Andriani, R. Neneng Rina dan Nisa Noor Wahid 2018 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 – 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan 	(1) Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami fluktuasi, (2) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (3) Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, (4) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan	Jurnal Akuntansi, Vol. 13, No. 1, 2018, Universitas Siliwangi, ISSN 1907-9958

				berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	
11	Putri, Meilda Ellysa dan Sri Rahayu 2015 Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah 	secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3% dan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.	<i>e-Proceeding of Management</i> , Vol. 2, No.1, 2015, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Telkom, ISSN 2355-9357
12	Mariyanto, Joko 2015 Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah 	Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen yang dominan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga penerimaan pajak daerah harus terus ditingkatkan dengan cara optimalisasi pemungutan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah merupakan komponen yang penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah.	Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 11, No. 1, 2015, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
13	Nugraha, I Putu Bagus Indra Mulia dan A.A.N.B Dwirandra	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • DAU • DBH • Pertumbuhan Ekonomi 	Pajak daerah, retribusi daerah, DAU dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada belanja modal sedangkan DBH tidak	E-Jurnal Akuntansi, Vol.14, No.1, 2016, Fakultas Ekonomi dan

	2016 Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU Dan DBH Pada Belanja Modal		• Belanja Modal	berpengaruh pada belanja modal. Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah pada belanja modal, namun tidak mampu memoderasi pengaruh DAU dan DBH pada belanja modal.	Bisnis, Universitas Undayana, ISSN 2303- 1018
14	Sanga, Konstatinus Pati, dkk 2018 Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah 	• Pendapatan Asli Daerah	secara parsial variabel Pajak Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai 0,103 dan untuk variabel Retribusi Daerah juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai 0,410. Kemudian secara simultan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai signifikan 0,045. Dimana variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai kontribusi sebesar 87% terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah, sedangkan sisanya sebesar 12,7% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.	<i>ACCOUNTING UNIPA</i> , Vol. VIII, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nusa Nipa Maumere
15	Mea, Frangky Martinus, dkk 2017 Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli	• Pajak Daerah	• Pendapatan Asli Daerah	kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kurun waktu 2011-2015 masih di bawah 50 persen dan Pendapatan Asli Daerah berada di level 5 persen atas Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Hal ini	Agri- SocioEkono miUnsrat, Vol. 13, No. 2A, 2017, Universitas Sam Ratulangi, ISSN 1907- 4298

	Daerah Di Kabupaten Minahasa			mengakibatkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran penduduk masih kurang yang tergambar dari tingkat pendapatan per kapita yang masih kurang dan tingkat kemandirian daerah masih rendah. Analisis tren pajak daerah untuk tahun 2016-2020 mengalami peningkatan namun masih berada dibawah 5 (lima) miliar rupiah setiap tahunnya sehingga masih perlu ditingkatkan.	
16	Puspitasari, Arum dan Naila Rizki Salisa 2017 Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Karesidenan Pati Tahun 2010-2016)	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Alokasi Umum 	(1) Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. (2) Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	<i>ACCOUNTING GLOBAL JOURNAL</i> , Vol. 1, No. 1, 2017, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muria Kudus
17	Nasution, Anggi Pratama, dkk 2018 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Transfer Pemerintah Pusat • Efisiensi Belanja Modal Daerah 	variabel pendapatan asli daerah, transfer pemerintah pusat, dan efisiensi belanja daerah, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah kemerdekaan. Secara parsial variabel pendapatan daerah, transfer pemerintah pusat berpengaruh signifikan tentang kemandirian keuangan daerah. Namun, efisiensi belanja daerah tidak berpengaruh positif terhadap	Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, Vol. 9, No. 1, 2018, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, ISSN 2087-4669

				kemandirian keuangan daerah.	
18	S, M. Zahari M 2016 Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah • Retribusi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • PAD 	Potensi pajak dan retribusi daerah masih rendah dan perlu ditingkatkan. Selama periode 2010-2015, kontribusi pajak daerah pendapatan asli daerah terhadap PAD rata-rata 23,1% satu tahun, dan kontribusi pendapatan asli daerah penerimaan retribusi rata-rata 16,01% satu tahun. Secara keseluruhan, pajak lokal dan lokal retribusi berpengaruh terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Sarolangun.	Eksis, Vol. 7, No. 2, 2016, Fakultas Ekonomi, Universitas Batanghari
19	Kristina, Siti Raun, dkk 2021 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah • Dana Perimbangan 	Hasil penelitian menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah, sementara untuk variabel Dana Perimbangan tidak mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. dan secara bersamaan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.	Jurnal EMBA, Vol. 9, No. 1, 2021, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, ISSN 2303-1174
20	Putra, Rico dan Surya Hidayat 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Keuangan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi 	1) Tingkat Kemandirian keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah masih rendah; 2) Tidak terdapat	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah,

	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi			hubungan yang signifikan antara rasio kemandirian keuangan daerah (derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio kemandirian dan efektivitas PAD) dengan pertumbuhan ekonomi.	Vol. 3, No. 4, 2016, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, ISSN 2338-4603
<p>Rizki Darussalam 173403155 (2022)</p> <p>Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020)</p>					

Sumber: Jurnal

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik akan melakukan penelitian mengenai : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2015-2020.
2. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat baik secara parsial maupun bersama-sama periode Tahun 2015-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2015-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat baik secara parsial maupun bersama-sama periode Tahun 2015-2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya untuk membahas pajak daerah, retribusi daerah dan kemandirian keuangan daerah.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan penulis serta mengetahui penerapan ilmu akuntansi di bidang sektor publik.
- b. Bagi Lembaga khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, bahan masukan dan perbandingan di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pentingnya kemandirian keuangan daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020 yang data keuangannya dapat diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juli 2021 sampai dengan Desember 2022. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel di lampiran penelitian.